

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

*Dalam Perspektif Intermestik
(Internasional Domestik)*

Editor:
Muhammad Yamin.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM PERSPEKTIF INTERMESTIK (INTERNASIONAL DOMESTIK)

Karya :

Arum Tri utami, Nuriyeni Kartika Bintarsari, Kholifatus Saadah, Tundjung Linggarwati, Arif Darmawan, Renny Miryanti, Muhammad Yamin, Arief Bakhtiar Darmawan, Agus Ganjar Runtiko, Jupi Supriatna, Dita Aditya Putri, Poppy Dwi Yustika, David Yoanedi Putra, Ilham Pangestu, Neli Maghfiroh Rodhotul Hasanah, Agil Maesyiatun Khasanah, Aminannisa Rahmatika Hayati, Yaser Alkadri Nasution, Rahmad Agus Dwianto, Titin Purwaningsih, I Putu Arya Aditia Utama.

Editor :

Muhammad Yamin. M.Si

Design Cover & Tata Letak :

Yusuf Muhammad Iqbal

Penerbit :



Satria Indra Prasta Publishing (Anggota IKAPI)
Jl. Curug Cipendok Km.1
Kalisari, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku tanpa izin penerbit dan penulis

ISBN: 978-623-337-906-9

Cetakan Pertama, Februari 2023

Ukuran Buku: B5

Halaman: x + 254

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Pembangunan berkelanjutan secara umum dimaknai sebagai pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan tanpa mengorbankan generasi selanjutnya. Istilah ini muncul karena pembangunan dalam bidang ekonomi seringkali mengorbankan lingkungan hidup dan menyisakan persoalan – persoalan sosial. Dalam studi Hubungan Internasional, dampak dari pembangunan (industri) terhadap persoalan lingkungan dan sosial dikaji secara luas, misalnya kajian mengenai perubahan iklim dan kajian mengenai kesenjangan sosial.

Sementara itu, *Sustainable Development Goals* (SDGs) sering diartikan sebagai pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kesinambungan kehidupan sosial masyarakat. SDGs memiliki 17 tujuan komitmen global dan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, ada tiga kata prinsip agar tidak seorang pun ditinggalkan dalam SDGs yaitu inklusif, terintegrasi, dan universal.

Dalam rangka mendukung SDGs, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman mempersembahkan book chapter dengan tema “Sustainable Development Goals dalam Perspektif Interestetik (Internasional Domestik)”. Buku ini merupakan kumpulan curahan pemikiran dari civitas akademika di Universitas Jenderal Soedirman dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah sekaligus mengevaluasi implementasi SDGs di Indonesia. Dalam buku ini terdapat 11 (sebelas) Artikel dimana topik – topik yang ada merupakan hasil dari diskusi dan renungan pemikiran dosen dan mahasiswa Prodi Hubungan

Internasional. Untuk itu, secara khusus saya mengapresiasi para penulis atas kerja keras mereka untuk memberikan sumbangan pemikiran atas SDGs.

Sebagai penutup, saya mengutip Gro Harlem Brundtland, politisi Norwegia yang dikenal sebagai Chair of the World Commission on Environment and Development (WCED), *“Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”*

Purwokerto, 7 Januari 2023

Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar — iii

Daftar Isi — v

Peran G20 Sebagai *Global Governance* dalam Mendorong Tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 — 1

Abstrak — 1

Pendahuluan — 2

Konsep Global Governance — 5

Peran G20 dalam Mendorong Tercapainya SDGs — 8

Agenda G20 Dalam Mendukung Tercapainya SDGs — 13

Pentup — 18

Referensi — 19

Pengalaman Privatisasi Air di Cile dan Indonesia: Efektifkah sebagai Upaya Pemenuhan SDGs ke-6? — 23

Abstrak — 23

Pendahuluan — 24

Privatisasi Air di Negara Dunia Ketiga — 25

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-6: Tidak Hanya Soal Ketersediaan Air — 27

Privatisasi Air: Sebuah Solusi? — 28

Cerita Privatisasi Air di Jakarta, Indonesia — 31

Kronologi Privatisasi Air di Jakarta, Indonesia — 31

Melihat Efektivitas Privatisasi Air di Jakarta — 32

Cerita Privatisasi Air di Cile — 36

Perekonomian dan Privatisasi di Cile — 36
Kronologi Privatisasi Air di Cile — 38
Berhasilkah? — 39
Kesimpulan: Membandingkan Privatisasi Air di Indonesia
dan Cile — 41
Referensi — 43

Keselarasan Program Kampung Iklim (Proklim) Bagi Upaya Pencapaian
SDGs di Indonesia — 47

Abstrak — 47
Pendahuluan — 48
Program Kampung Iklim — 50
ProKlim dan SDGs — 54
Penutup — 61
Referensi — 62

Implementasi Konsep *Ecological Civilization* Sebagai Upaya Cina dalam
Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sektor Lingkungan
Hidup — 65

Abstrak — 65
Pendahuluan — 66
Penanganan Problem Lingkungan Hidup Sebagai Fokus Pelaksanaan
SDGs di Cina — 68
Implementasi Konsep *Ecological Civilization* Dalam SDGs Cina 70
Penutup — 84
Referensi — 85

Environmental Peacebuilding melalui Proyek *Good Water Neighbors* antara Palestina, Israel, Yordania dan Kontribusinya terhadap Pencapaian Tujuan Ke-16 *Sustainable Development Goals* di Kawasan Timur Tengah — 91

Abstrak — 91

Pendahuluan — 93

Environmental Peacebuilding — 95

Sejarah Proyek *Good Water Neighbors* — 97

Desain Proyek *Good Water Neighbors* — 101

Keberhasilan Proyek *Good Water Neighbors* — 111

Penutup — 115

Referensi — 116

Ancaman terhadap SDGs Nomor Dua: Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyumas Pasca-Pandemi — 125

Abstrak — 125

Pendahuluan — 126

Ketahanan Pangan: Fenomena dan Solusi — 128

Analisis Fenomena Terkini dan Solusi yang Dibutuhkan — 131

Solusi untuk Pemerintah Daerah — 133

Penutup — 135

Referensi — 136

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Capaian *Sustainable Health Development* di Indonesia — 139

Abstrak — 139

Pendahuluan — 140

Kinerja Sustainable Health Development di Masa Pandemi — 143

Hambatan Progress SDGs Tujuan Ketiga di Masa Pandemi — 150

Resiliensi Sustainable Health Development di Indonesia pada Masa Pandemi — 152

Penutup — 153

Referensi — 154

Implementasi SDGs Nomor Tujuh di Desa Rempoah: Pemanfaatan Biogas pada Sektor Peternakan sebagai Energi Alternatif — 157

Abstrak — 157

Pendahuluan — 158

Metode Penelitian — 163

Hasil dan Pembahasan — 163

Penutup — 169

Referensi — 170

Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan *Smart Village* menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa — 173

Abstrak — 173

Pendahuluan — 174

Pembangunan Wilayah Desa Berlandaskan Teknologi Informasi — 177

Smart Village sebagai Bentuk Pemberdayaan Perdesaan — 178

Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan — 181

Sustainable Development Goals Desa — 186
Penutup — 187
Referensi — 188

Strengthening SDGs in Indonesia: Digital Marketing Business Roadmap of Village-Owned Enterprises (BUMDes) — 191

Abstract — 191
Introduction — 192
Research Methods — 196
Result and Discussion — 197
Digital Marketing Roadmap of BUMDes — 199
Conclusion — 215
References — 215

Indonesia's Commitment in the New Renewable Energy Transition Post Conference of the Parties 26 to Achieve SDG's Point 7 — 221

Abstract — 221
Introduction — 222
Discussion — 226
COP-26 Outcomes — 226
Conditions of Energy Utilization in Indonesia — 231
Indonesia's New Renewable Energy Transition Commitment Post COP-26 — 235
Conclusion — 238
References — 239

Profil Kontributor — 244

Profil Editor — 254

Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan *Smart Village* menuju Sustainable *Development Goals (SDGs)* Desa

Agus Ganjar Runtiko

Universitas Jenderal Soedirman
agus.runtiko@unsoed.ac.id

Abstrak

Pembangunan pedesaan mengalami perubahan pesat sejak berkembangnya teknologi informasi. Inovasi pembangunan perdesaan dipermudah dengan media hibrida, dalam kaitannya membentuk sebuah “Desa Berjejaring”, serta memberdayakan komunitasnya. Pencanangan SDGs Desa melalui Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 memudahkan masyarakat dan pemerintah desa menyusun target guna dapat memenuhi indikator, alih-alih hanya berpedoman pada indicator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang masih cenderung abstrak dan kurang menyentuh perdesaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya jaringan internet, menambah kemudahan masyarakat desa untuk meraih indicator yang dirumuskan dalam konsep “smart village”. Secara bersama-sama, konsep SDGs Desa dan konsep *smart village* disatukan melalui komunikasi pembangunan berkelanjutan, sehingga seluruh warga perdesaan ikut terlibat dan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Kata kunci: Komunikasi, Pembangunan, Desa, SDGs, Keberlanjutan

Pendahuluan

Pembangunan wilayah perdesaan menjadi salah satu faktor yang menentukan dan menjadi dasar landasan bagi pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi. Potensi sumber daya yang dimiliki perdesaan, yang meliputi potensi sumber daya manusia terdiri dari para petani, peternak, pekerja informal serta pengusaha mikro dan kecil; kemudian potensi sumber daya alam tersedia sebagai prasarana pendukung kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, hingga wisata.

Pembangunan masyarakat di perdesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan di wilayah perdesaan (Adisasmita, 2006). Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi: transparansi, partisipatif, dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, pertanggungjawaban kelembagaan (akuntabilitas), dan berkelanjutan. Proses pembangunan masyarakat dan pengembangan perdesaan melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi yang saling berinteraksi. Interaksi faktor-faktor tersebut menawarkan keragaman yang memiliki dampak berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai perbedaan karakteristiknya.

Pembangunan desa perlu secara partisipatif memberikan kesempatan pada seluruh elemen masyarakat turut berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan daya dukung lingkungannya. Muara dari pembangunan partisipatif tersebut adalah kesadaran warga masyarakat untuk tidak lagi meninggalkan perdesaan guna bekerja ke di kota, atau bahkan ke luar negeri, melainkan memberdayakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya untuk kemajuan perdesaan.

Usaha pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya dalam kerangka memajukan wilayah perdesaan dapat bermacam-macam. Misalnya saja, desa dengan potensi wisata tinggi dapat digerakkan untuk mengeksplorasi keragaman wisata yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan (Chusmeru, Sulaiman, Adi, & Runtiko, 2022). Masyarakat desa, ternyata bisa didorong untuk mengembangkan kreativitas, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi potensi utama pariwisatanya; seperti membuat keterampilan produk yang dapat dijadikan cinderamata, atau kreasi pertunjukan yang menarik wisatawan.

Konsep dan proses pembangunan saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk dalam konteks perdesaan. Pembangunan perdesaan tidak lagi terbatas pada sektor agraris dan infrastruktur, akan tetapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peran media yang awalnya berupa media massa konvensional, saat ini semakin berkembang dengan adanya media baru.

Karakter media baru cenderung mengombinasikan fungsionalitas media massa konvensional dengan komunikasi interpersonal, sehingga komunikasi dapat menjangkau banyak orang di lokasi yang berbeda-beda, sekaligus mendukung interaktivitas pada tingkat yang lebih tinggi (Leeuwis, 2009). Media baru yang sistem aksesibilitasnya dilakukan secara digital, pada akhirnya mengakomodir pelaksanaan pembangunan perdesaan ke dalam sistem komunikasi konvergen yang meliputi komunikasi interpersonal, media massa, dan media hibrida (internet). Akomodasi sistem komunikasi konvergen bertujuan agar lebih banyak pihak dari berbagai generasi yang terlibat dan berpartisipasi dalam upaya mempercepat tujuan pembangunan. Sebab, proses pembangunan tidak bisa mengabaikan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan hasilnya juga dinikmati bersama.

Tujuan proses pembangunan bermuara pada proses pengurangan ketergantungan pada peran pemerintah, karena semakin berdaya dan kreatifnya masyarakat pedesaan dalam pengembangan inovasi. Terjadi pergeseran sasaran pembangunan, dari yang awalnya merupakan rangkaian susunan program komprehensif untuk mencapai sasaran atau tujuan dengan definisi jelas, menjadi upaya-upaya persiapan tatanan menghadapi perubahan lingkungan yang semakin dinamis demi untuk mempertahankan keberlangsungan eksistensi masyarakat. Perubahan konsepsi pembangunan ini merupakan dampak dari pergeseran cara persepsi manusia terhadap dunia (Amien, 2005).

Beberapa upaya dilakukan masyarakat desa dalam menghadapi perubahan dan disrupsi sosial. Di Banyumas misalnya, pada sekitar tahun 2011 terdapat gerakan mandiri masyarakat desa dalam pembangunan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Nama inisiasi masyarakat tersebut adalah Gerakan Desa Membangun (GDM), yang pada awalnya dipusatkan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng (Badri, 2016). Ternyata, GDM merupakan bentuk keswadayaan masyarakat desa menjawab tantangan yang mereka hadapi. Lebih dari itu, mereka mampu membuktikan kemampuan otodidiknya dalam penggunaan teknologi, sehingga desanya bisa lebih dikenal masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan.

Pada periode selanjutnya, muncul gerakan “Smart Villages”, yang diilhami oleh istilah yang dipopulerkan oleh Boyd Cohen (Cohen, 2014). Tujuannya serupa dengan GDM, yakni menggunakan teknologi sebagai sarana memajukan desa. Bedanya, “Smart Village” ini memiliki beberapa indikator yang lebih terukur guna menilai keberhasilan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya indikator keberhasilan diharapkan dapat mendorong pembangunan desa menjadi berkelanjutan,

atau berorientasi pada “SDGs Desa”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini hendak melakukan analisis terhadap komunikasi pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perdesaan di Banyumas yang menerapkan digitalisasi guna mencapai SDGs Desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan, atau literature review, yang mengumpulkan data dari penghimpunan dan analisis dokumen-dokumen, dengan bentuk elektronik, gambar serta tertulis. Tulisan ini menghimpun, mengumpulkan, dan menganalisis konten yang berada pada teks buku, jurnal, maupun hasil penelitian mengenai desa cerdas (*smart village*) di Kabupaten Banyumas, serta data pendukung lainnya seperti data-data website maupun media sosial mereka.

Pembangunan Wilayah Desa Berlandaskan Teknologi Informasi

Paradigma adalah dasar penting untuk pemahaman mendalam tentang masalah kehidupan dan untuk memecahkannya. Dalam tahapan praktis tertentu, paradigma pembangunan juga dapat dianggap sebagai kesatuan teori, model, strategi dan sistem manajemen tertentu dalam pengelolaan dan pembangunan (Nawawi, 2009). Berlawanan dengan konsep pembangunan tradisional, yang memiliki analogi masalah pembangunan dengan “keterbelakangan” (paradigma modernisasi) dan/atau “ketergantungan” (paradigma dependensi), ilmu baru melihat masalah tersebut sebagai akibat dari keadaan stagnan dan/atau terisolasi (Amien, 2005). Kondisi ini sering dialami desa-desa yang perkembangannya stagnan dan terisolasi dari pusat pembangunan. Untuk menghilangkan perbedaan antar daerah dan antara desa dengan kota, diperlukan perubahan paradigma dalam memandang desa.

Berkaitan dengan perkembangan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi yang semakin merata di perdesaan, terdapat penjelasan dalam UU. No. 6 Tahun 2013 tentang Desa mengenai skala prioritas utama pembangunan desa yang difokuskan pada sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan. Poin-poin yang cukup menarik dipaparkan dalam pasal 86 dapat disimak sebagai berikut:

1. Desa memiliki hak akses informasi pada Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah wajib melakukan pengembangan SID dan pembangunan kawasan desa.
3. SID meliputi hardware dan software, jaringan, serta operator sebagai sumber daya manusia.
4. SID berisi antara lain mengenai data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta berbagai informasi berhubungan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
5. Pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa dan bebas akses bagi masyarakat dan seluruh stakeholder.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa.

Smart Village sebagai Bentuk Pemberdayaan Perdesaan

Batasan pengertian desa umumnya didefinisikan berdasarkan kajian utama peneliti yang mendefinisikannya. Simanjuntak misalnya (Simanjuntak, 2016) mendefinisikan desa berdasarkan tiga unsur utama yang dimilikinya; yaitu adanya unsur daerah yang terdiri dari tanah dan ruang yang menjadi tempat atau wadah bagi penduduknya. Unsur kedua adalah warga desa, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok.

Unsur ketiga adalah ikatan antarwarga yang berbentuk tata pergaulan atau interaksi sosial di antara sesama warga. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi “lebih resmi” mengenai desa sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014). Pada praktiknya, desa didefinisikan berdasarkan penetapan peraturan perundang-undangan (Perda) dari pemerintah kabupaten/kotamadya, dan pada periode waktu berbeda dapat diubah menjadi kelurahan, yang menjadi representasi masyarakat kota.

Pada umumnya, wilayah perdesaan identik dengan permasalahan-permasalahan klasik yang mengiringi. Permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategorisasi. Pertama, berkaitan dengan manusia sebagai penduduk yang menghuni wilayah perdesaan, yang sering dianggap tidak memiliki daya saing. Kedua, lingkungan atau wilayah yang terletak relatif jauh dengan pusat kota, pusat ekonomi, atau pusat pengambilan kebijakan, sehingga kurang tersentuh pembangunan. Ketiga, permasalahan ekonomi yang cenderung tertinggal dengan masyarakat perkotaan, sehingga warga desa lebih suka bekerja di kota untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Permasalahan di perdesaan mendorong inovasi-inovasi yang dianggap dapat memberikan solusi. Salah satunya adalah upaya menjadikan desa menjadi cerdas (*smart village*). Penerapan teknologi tepat guna merupakan basis pembangunan *smart village*. Efek lanjutan dari penerapan teknologi tepat guna itu adalah terobosan-terobosan

upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat *smart village*, sehingga dapat memenuhi kualifikasi menjadi Desa Mandiri; yakni tersedianya layanan dasar, infrastruktur memadai, serta layanan umum dan pemerintahan yang sangat baik, dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih besar dari 75 dalam skala 1-100 (Damarjati, 2021).

Potensi sebuah desa menjadi *smart village* saat ini cukup tinggi, mengingat jangkauan teknologi yang sudah masuk ke pedalaman perdesaan, terutama di wilayah Jawa. Selain itu, adanya indikator-indikator ilmiah menjadikan konsep *smart village* dapat diukur secara valid.

Pada dasarnya konsep *smart village* merupakan adopsi dari konsepsi *smart city*, yang diidentifikasi memiliki enam dimensi utama (Cohen, 2014). Keenam indikator tersebut meliputi adanya pemerintahan yang cerdas (*smart government*), *smart society* (kehidupan sosial bermasyarakat yang cerdas), *smart economy* (penghidupan masyarakat yang cerdas), *smart mobility* (pergerakan sosial yang cerdas), *smart environment* (tata lingkungan yang cerdas), serta kualitas hidup (*quality of live*).

Tampaknya, beberapa desa di Banyumas sudah tergerak untuk mulai memenuhi indikator-indikator desa cerdas. Misalnya saja Desa Melung yang sudah merintisnya sejak tahun 2011 dengan inisiasi Gerakan Desa Membangun (Badri, 2016). Melung terkenal sebagai desa internet, dan menjadi salah satu percontohan di Banyumas. Saat ini, Desa Melung sudah melengkapi sarana informasinya dengan berbagai media sosial yang aktif.

Aktifitas media sosial di Desa Melung meliputi upaya untuk memenuhi kategori *smart government* yang mengacu pada prinsip *good*

governance. (Cohen, 2014) mengatakan bahwa kategori *smart government* mensyaratkan peningkatan profesionalisme kinerja aparat pemerintahan yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan dengan dukungan teknologi informasi. Desa Melung mengaplikasikannya dengan membuka pelayanan melalui media sosial, selain memanfaatkan website yang mereka bangun sejak 2011.

Bidang lain yang dapat menjadi cerminan smart village adalah dalam bidang ekonomi (*smart economy*). Desa Melung menerapkan terobosan dalam bidang ekonomi dengan mendorong salah satu objek wisatanya, yakni Pagubugan yang dikelola oleh BUMDes (Rahayu, 2022). Beberapa desa lain, juga cenderung mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menginformasikan potensi wisata unik yang mereka miliki. Misalnya saja, potensi wisata religi di Desa Cikakak, dan potensi wisata keragaman agama di Banjarpanepen (Sulaiman, Chusmeru, Adi, & Runtiko, 2022).

Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan

Komunikasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai tindakan yang dimediasi secara simbolis, di mana manusia membangun realitas mereka berdasarkan persepsi dan pengalaman. Beberapa pemikiran sosiologis mendasari anggapan ini, seperti pemikiran tentang konstruksi realitas sosial (Berger & Luckmann, 1966). Pendekatan Niklas Luhmann (1989) dalam teori sistem menunjukkan makna komunikasi dengan sangat baik: “Ikan atau manusia mungkin bisa mati; berenang di danau dan sungai dapat menyebabkan resiko sakit yang tinggi; tidak ada lagi minyak bumi yang tersedia; dan pemanasan global yang meningkat tajam, tetapi selama hal tersebut tidak dikomunikasikan, tidak ada pengaruhnya pada masyarakat”. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa perilaku manusia,

nilai-nilai sosial dan sikap terhadap dunia dan lingkungan dimediasi oleh komunikasi.

Komunikasi pembangunan pada hakekatnya adalah disiplin ilmu dan praktik komunikasi dalam konteks negara berkembang, khususnya komunikasi untuk perubahan sosial yang direncanakan. Tujuan komunikasi pembangunan pada dasarnya adalah mempromosikan pembangunan manusia, secara lebih spesifik memberantas kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan (Harun & Ardianto, 2011).

Kajian komunikasi pembangunan secara filosofis diilhami oleh upaya untuk membebaskan dan mencerahkan pembangunan dalam menanamkan semangat martabat dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa kegiatan pembangunan dalam bentuk dan cara apapun selalu bermuara pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh (Dilla, 2007). Hedebro (Harun & Ardianto, 2011) mengidentifikasi adanya tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang saling berhubungan, yaitu:

1. Sebuah pendekatan yang berfokus pada pembangunan bangsa dan kontribusi media dalam upaya ini. Politik dan aktivitas media dalam pengertian umum dibahas di sini, serta isu-isu yang berkaitan dengan struktur organisasi dan kepemilikan serta kontrol media. Kajian ini menggunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan umum.
2. Pendekatan yang lebih rinci memahami peran media massa dalam pembangunan. Menurut pendekatan ini, media adalah pendidik atau guru, dan gagasannya adalah penggunaan media untuk mengajarkan berbagai keterampilan kepada orang-orang dan dalam kondisi tertentu memengaruhi sikap mental

dan perilaku mereka. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah bagaimana media dapat digunakan secara efektif untuk mengajarkan informasi tertentu kepada publik.

3. Suatu pendekatan yang berorientasi pada perubahan masyarakat setempat atau desa. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana kegiatan komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan ide, produk, dan praktik baru di desa atau wilayah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari konsep tersebut adalah bahwa komunikasi pembangunan merupakan strategi yang menekankan pada penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat dengan prinsip pemberdayaan untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku untuk meningkatkan harkat dan martabat serta menanamkan semangat kemandirian masyarakat. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa komunikasi pembangunan tidak lagi menempatkan pemerintah di atas rakyat yang hanya membentuk model komunikasi top-down. Karena di negara dengan sistem politik terbuka seperti Indonesia, pemerintah idealnya menjaga kesetaraan rakyat sesuai tuntutan dan cita-cita reformasi. Dalam konteks ini, teknologi informasi *open source* dapat lebih mempromosikan keterbukaan, partisipasi dan kesetaraan ini.

Dengan pola komunikasi tersebut maka proses pembangunan sejak perencanaan perlu melibatkan semua pihak baik obyek, pelaku, maupun fasilitator. Schramm dalam Harun dan Ardianto (2011) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu pembangunan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu:

Konsepsi komunikasi ini, memiliki dampak pelibatan semua pihak, baik objek, pembuat maupun fasilitator, dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Schramm dalam (Harun & Ardianto, 2011)

merumuskan tugas pokok komunikasi dalam pembangunan masyarakat sebagai:

1. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat agar terfokus pada kebutuhan, peluang dan cara melakukan perubahan, cara mengubah dan membangkitkan aspirasi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperluas dialog dan mengikutsertakan semua pihak yang memutuskan perubahan, memberikan kesempatan kepada pimpinan daerah untuk memimpin dan mendengarkan pendapat masyarakat biasa, dan menciptakan arus komunikasi yang lancar informasi dari atas ke bawah.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep normatif dengan motivasi etis yang mengacu pada bentuk ekonomi dan gaya hidup yang tidak membahayakan masa depan umat manusia (Godemann & Michelsen, 2011). Pendekatan etis untuk membentuk masa depan umat manusia hendaknya didasarkan pada pemahaman yang kuat mengenai keberlanjutan, yakni yang mengajukan premis substitusi tanpa batas dari semua sumber daya alam dengan setara.

Diskusi tentang pembangunan berkelanjutan tertanam dalam pola persepsi dan tindakan budaya manusia. Misalnya saja persepsi mengenai fenomena masalah lingkungan, yang tidak bertumpu pada permasalahan lingkungannya, melainkan lebih kepada konteks budaya. Visi keberlanjutan pembangunan juga terkait dengan konsep modernisasi dan pengembangan masyarakat yang memerlukan partisipasi individu-individu di dalamnya secara lebih kuat. Dalam konteks ini komunikasi dapat dipahami sebagai proses sosial yang merekatkan partisipasi

terhadap pembangunan.

Komunikasi pembangunan berkelanjutan merupakan proses pemahaman bersama (*mutual understanding*) berkaitan dengan pengembangan masyarakat di masa depan dengan visi keberlanjutan (Godemann & Michelsen, 2011). Visi keberlanjutan sendiri berbicara tentang nilai-nilai dan norma-norma; seperti keadilan pembangunan antargenerasi dan intragenerasi, atau mengenai penyebab dan kemungkinan kesadaran individu dan komunitas dalam mengambil peranan serta mempengaruhi pembangunan. Proses pemahaman bersama dalam komunikasi pembangunan berkelanjutan terjadi pada sejumlah tingkatan yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda: konteks antarindividu, antara individu dan organisasi, antarorganisasi, pada lembaga-lembaga pendidikan, media, politik, bisnis, dalam tingkat komunitas lokal, nasional, bahkan hingga di tingkat internasional. Keberhasilan komunikasi tentang pembangunan berkelanjutan kemudian tergantung pada sejumlah besar faktor.

Tugas komunikasi komunikasi berkelanjutan terletak pada upaya mengenalkan pemahaman tentang relasi antara manusia dan lingkungannya ke dalam diskursus sosial, mengembangkan kesadaran kritis mengenai permasalahan relasi ini serta mengaitkannya dengan nilai dan norma sosial. Pengetahuan ilmiah dan diskursus ilmiah memainkan peran penting dalam kontribusinya untuk memperkuat berbagai perspektif dalam ilmu komunikasi. Komunikasi pembangunan berkelanjutan menawarkan kerangka kerja untuk memahami berbagai sistem dan aktor sosial (sains, bisnis, pendidikan, media, dan sebagainya).

Sustainable Development Goals Desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan dunia yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2015. SDGs ini menggantikan MDGs (Millennium Development Goals), yang dicanangkan sejak tahun 2000. SDGs dianggap lebih mewakili semangat pembangunan kekinian yang orientasinya adalah keseimbangan dengan daya dukung lingkungan.

SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator ternyata belum banyak mengakomodir desa. Di sisi lain, desa merupakan wilayah yang paling luas di Indonesia. Artinya, banyak daerah yang belum terakomodir visi pembangunan berkelanjutan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), kemudian menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada Pasal 1 ayat 14, mulai dikenalkan istilah SDGs Desa yang didefinisikan sebagai upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SDGs Desa memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa. Awal pencanangan SDGs Desa adalah pendataan, yang merinci satu nama, satu alamat warga dan keluarga, data wilayah RT, serta data pembangunan desa. Selanjutnya, data tersebut dimasukkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) untuk dikelola potensi dan masalahnya.

Salah satu hal menarik dari SDGs Desa adalah penguraian 18 tujuannya pada Pasal 7. Di antaranya pada poin (q) yang berusaha mewujudkan kemitraan untuk pembangunan desa. Perlu disadari

bahwasanya pembangunan perdesaan memerlukan peran *stakeholder* yang dapat memaksimalkan upaya pembangunan desa. Kemitraan ini dapat diraih dengan komunikasi, yang dibangun melalui media dan teknologi, serta pemanfaatan internet. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan ini antara lain ketersediaan jaringan internet di desa. Semuanya bermuara pada tujuan Desa Berjejaring. Keberlanjutan jejaring desa dipelihara dengan eksistensi digitalisasi yang berlanjut. Digitalisasi ini juga dijadikan sentral data yang menjadi basis kegiatan serta anggaran.

Penutup

SDGs Desa dan *Smart Village* lahir sebagai upaya jawaban atas permasalahan pembangunan yang didasarkan pada potensi desa. SDGs Desa merupakan jawaban atas belum tersentuhnya wilayah perdesaan secara holistik dalam indikator-indikator yang dirumuskan dalam SDGs yang disepakati dalam rapat umum PBB pada 2015. SDGs Desa lebih membumi dan lebih local, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan secara mudah. *Smart Village* di sisi lain, merupakan adaptasi konsep *smart city* yang disesuaikan dengan kondisi perdesaan di Indonesia. Secara kebetulan, saat ini sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi telah dapat dirasakan oleh desa-desa, terutama di Jawa.

Saat ini, dua model pendekatan pembangunan desa tersebut merupakan kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung bersifat top-down, dan masyarakat desa cenderung hanya menjadi objek pembangunan. Desa, secara tidak langsung, didorong untuk lebih memiliki kedaulatan dan kewenangan lebih dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. Pengelolaan sumber daya di perdesaan dan tata kelola pemerintahan, dengan demikian, dapat dijalankan sesuai keadaan

dan potensi desa masing-masing. Hal pokok yang perlu diperhatikan adalah adanya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan dikerjakan secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat.

Bentuk komunikasi pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh desa adalah dengan berbasis digital internet. Sifat komunikasinya dapat berupa *one to many*, *one to one*, serta *many to many*. Artinya, tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam komunikasi pembangunan berkelanjutan ini, sebagaimana tujuan SDGs: *no one left behind*. Optimalisasi website desa, media sosial desa, pendukung transaksi elektronik, serta internet of thing (IoT) sangat dibutuhkan dalam mengejawantahkan tujuan tersebut.

Desa, dengan demikian juga memiliki potensi lebih berdaya, karena lebih dikenal berkat informasi pembangunan yang tersebar luas. Dukungan stakeholder, yang selama ini kurang, dapat lebih gayut; terutama dari pemerintah, perguruan tinggi, *corporate*, LSM, dan praktisi. Di masa mendatang, desa tidak lagi mengalami kesenjangan dibandingkan kota, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata.

Referensi

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amien, A. M. (2005). *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Badri, M. (2016, Desember). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: Studi Pada Gerakan Desa Membangun. *Jurnal Risalah*, 27(2), 62-73.

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Chusmeru, Sulaiman, A. I., Adi, T. N., & Runtiko, A. G. (2022). Strategi Pemberdayaan dalam Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. In A. I. Sulaiman, A. Rizki, A. Farianingrum, & P. Muhamad, *Komunikasi Pembangunan: Dalam Kearifan Lokal di Era Digital* (pp. 229-245). Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Cohen, B. (2014, 11 20). *The Smartest Cities in the World 2015: Methodology*. Retrieved 01 11, 2023, from www.fastcompany.com: <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>
- Damarjati, D. (2021, Desember 26). *Smart Village Kemendes, Basis Pembangunan Indonesia di Masa Depan*. Retrieved Januari 12, 2023, from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5870797/smart-village-kemendes-basis-pembangunan-indonesia-di-masa-depan>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta, Jakarta, Indonesia. Retrieved Januari 11, 2022, from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Dilla, S. (2007). *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis.
- Godemann, J., & Michelsen, G. (2011). Sustainability Communication - An Introduction. In J. Godemann, & G. Michelsen, *Sustainability Communication, Interdisciplinary Perspectives and Theoretical Foundations* (pp. 3-11). New York: Springer.

- Harun, R., & Ardianto, E. (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Leeuwis, C. (2009). *Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Luhmann, N. (1989). *Ecological Communication*. (J. Bednarz Jr., Trans.) Chicago: The University of Chicago.
- Nawawi, I. (2009). *Pembangunan dan Problema Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Rahayu, S. P. (2022). Penerapan Smart Village di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 6(1), 494-500.
- Simanjuntak, B. A. (2016). *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sulaiman, A. I., Chusmeru, Adi, T. N., & Runtiko, A. G. (2022). Community Empowerment as Socio-Economic Education of Tourism Villages Based on Local Wisdom. *The Asian Institute of Research Education Quarterly Reviews*, 5(2), 54-67. doi:DOI: 10.31014/aior.1993.05.03.524